

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teori.....	21
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	27

1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	27
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	32
3. Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	35
4. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	36
B. Tinjauan Umum tentang Perpajakan Indonesia.....	38
1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak	38
2. Pemungutan Pajak	43
C. Tinjauan Umum Tentang Pemungutan Pajak Daerah.....	47
1. Pengertian Pajak Daerah.....	47
2. Pengelolaan Pajak Daerah.....	51
3. Pemungutan Pajak Daerah.....	52
D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah (Perda).....	55
1. Pengertian Peraturan Daerah (Perda).....	55
2. Materi Muatan Peraturan Daerah.....	56
3. Pengertian Otonomi Daerah.....	57
4. Asas-asas Pembentukan Perda.....	58
5. Dasar-Dasar atau Landasan-Landasan dalam Penyusunan Perda.....	63
6. Ruang Lingkup Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	64
7. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	64
8. Maksud dan Tujuan Pembuatan Peraturan Daerah.....	65

9. Teknik Membuat Peraturan Daerah.....	66
E. Tinjauan Umum Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	67
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	67
2. Objek dan Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	70
3. Proses Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	71
F. Pengertian Jual Beli Tanah Sebelum dan Setelah Keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).....	74
1. Pengertian Sebelum UUPA.....	74
2. Pengertian Setelah Keluarnya UUPA.....	78
G. Tinjauan Umum tentang Problematika Hukum.....	81
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penetapan Nilai Transaksi Sebagai Dasar Validasi BPHTB oleh Bapenda Kota Kendari.....	87
B. Problematika Hukum Yang Dapat Timbul Karena Perbedaan Harga Transaksi Sebenarnya dengan Verifikasi BPHTB oleh Bapenda Kota Kendari.....	92
C. Solusi Problematika Hukum Yang Timbul Karena Perbedaan Harga Transaksi Sebenarnya dengan Verifikasi BPHTB oleh Bapenda Kota Kendari.....	98

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

